

## SINERGI PENDIDIKAN DAMAI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: STUDI KASUS DI MAN 1 PIDIE, ACEH

Siti Aminah<sup>1)</sup>, Siti Ikramatoun<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Corresponding Author: [siti.aminah@usk.ac.id](mailto:siti.aminah@usk.ac.id)

### ABSTRACT

*Peace education is vital for fostering harmony and sustainable development, particularly in post-conflict areas like Aceh, Indonesia. This study explores the synergy between government policies and educational practices in implementing peace values at MAN 1 Pidie. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. Informants included school staff, teachers, and government officials. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, focusing on the translation of government policies into school practices. Six core peace values—cooperation, tolerance, mutual respect, teamwork, leadership, and recognition of rights—are integrated into MAN 1 Pidie's curriculum, extracurricular activities, and school culture. Government support through policy frameworks, teacher training, and resource provision is instrumental in sustaining these efforts. While the program has successfully fostered inclusivity and reconciliation, challenges such as resource disparities and limited teacher capacity remain. Collaborative efforts between stakeholders are essential for improving sustainability and relevance. This study highlights the importance of government-education collaboration in embedding peace values.*

*Keywords: Peace education, government policy, MAN 1 Pidie, Aceh*

### ABSTRAK

*Pendidikan damai merupakan elemen penting dalam mendorong harmoni dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah pasca-konflik seperti Aceh, Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian di MAN 1 Pidie. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan meliputi tenaga pendidik, staf sekolah, dan pejabat pemerintah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan fokus pada penerjemahan kebijakan pemerintah ke dalam praktik sekolah. Enam nilai utama—kerja sama, toleransi, penghormatan, gotong royong, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap hak—diintegrasikan dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya madrasah di MAN 1 Pidie. Dukungan pemerintah melalui kerangka kebijakan, pelatihan guru, dan penyediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Meskipun program ini berhasil mendorong inklusivitas dan rekonsiliasi sosial, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas guru tetap ada. Kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan keberlanjutan dan relevansi program ini. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian.*

*Kata Kunci: Pendidikan damai, kebijakan pemerintah, MAN 1 Pidie, Aceh*

## PENDAHULUAN

Perdamaian merupakan kondisi ideal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai individu dan dalam konteks masyarakat, tetapi juga dalam hubungan dengan planet ini. Konsep perdamaian berkaitan erat dengan koeksistensi harmonis yang bergantung pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, keberlanjutan, demokrasi, dan toleransi. Pendidikan perdamaian dan budaya perdamaian dapat dipromosikan melalui pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, yang memungkinkan integrasi berbagai bidang pengetahuan dan keahlian dalam upaya membangun dan memelihara perdamaian (Roque-Hernández, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan pendidikan damai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal. Sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian (Apebende et al., 2010; Ndwandwe, 2024). Kebijakan pemerintah yang efektif dapat memberikan panduan kepada lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, pelatihan guru, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi pendidikan damai (Fournier-Sylvester, 2020).

Budaya perdamaian melibatkan gaya hidup, pola keyakinan, nilai-nilai, perilaku, kesejahteraan, kesetaraan, pengelolaan sumber daya yang adil, keamanan individu dan keluarga, non-kekerasan, dan harmoni. Pendidikan perdamaian yang efektif harus menggabungkan pandangan realitas yang kompleks, menghubungkan isu-isu penting seperti kehidupan, kemanusiaan, budaya, kesusastraan, seni, filsafat, keberlanjutan, dan nilai-nilai, tanpa terbatas pada satu disiplin ilmu tertentu (Roque-Hernández, 2022). Di Indonesia, peran pemerintah dalam mendorong pendidikan damai dapat dilihat melalui berbagai kebijakan strategis seperti penguatan pendidikan karakter, pendidikan inklusif, dan penyediaan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pasca-konflik seperti Aceh (Dandarwati, 2013; Ilham et al., 2023; Manar, 2019). Pemerintah daerah dan pusat juga berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis perdamaian, serta program ekstrakurikuler yang mempromosikan kerja sama, toleransi, dan nilai-nilai sosial lainnya (Qulsum & Hermanto, 2022).

Kabupaten Pidie, sebagai salah satu daerah episentrum konflik di masa lalu (Manan et al., 2022), menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam

membangun perdamaian yang berkelanjutan. lembaga pendidikan sebagai institusi sosial memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai perdamaian dalam budaya pendidikan. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengakses dan memahami nilai-nilai toleransi yang tinggi terhadap sesama, dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi negatif yang berakibat munculnya sebuah konflik baru (Syahputra, 2020). Melalui pendidikan damai, lembaga pendidikan dapat menanamkan ataupun mempromosikan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membangun perdamaian seperti kedamaian dan anti-kekerasan, Hak Asasi Manusia dan toleransi (Yusuf, 2017). Artinya lembaga pendidikan pada dasarnya dapat berperan sebagai katalisator dalam menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya perdamaian dan toleransi, yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk komunitas yang lebih harmonis dan inklusif.

Dalam cermatan penulis, salah satu institusi pendidikan yang berperan penting dalam promosi nilai-nilai pendidikan damai adalah MAN 1 Pidie. Lembaga ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang dianggap paling unggul di Kabupaten Pidie. Dalam observasi penulis, lembaga pendidikan ini tidak hanya melibatkan siswa dalam pembelajaran formal tentang nilai-nilai damai tetapi juga mengintegrasikannya dalam program ekstrakurikuler dan kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah dalam mendukung inisiatif ini, baik melalui regulasi maupun pendanaan, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang toleran dan berwawasan global. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perdamaian. Fokus utama penelitian ini adalah pada nilai-nilai pendidikan damai yang ditanamkan di MAN 1 Pidie serta bagaimana lembaga pendidikan ini mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks dukungan kebijakan pemerintah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi pemerintah dan lembaga pendidikan di Kabupaten Pidie untuk meningkatkan efektivitas pendidikan damai di lingkungan pendidikan formal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan atau memperbarui kebijakan pendidikan yang relevan dengan promosi dan implementasi nilai-nilai perdamaian di daerah pasca-konflik.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami bagaimana MAN 1 Pidie mempromosikan nilai-nilai pendidikan damai dalam konteks dukungan pemerintah. Lokasi penelitian adalah MAN 1 Pidie, sebuah lembaga pendidikan

menengah di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang memiliki sejarah panjang terkait konflik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis sekolah sebagai institusi yang berkontribusi pada pendidikan damai di daerah bekas konflik.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan, termasuk kepala sekolah, wakil kepala bagian kurikulum, guru mata pelajaran (Sosiologi, Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Pendidikan Agama Islam), serta perwakilan pemerintah dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Observasi difokuskan pada interaksi di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta implementasi nilai-nilai damai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Analisis dokumen mencakup kurikulum sekolah, kebijakan pendidikan, serta laporan program yang relevan dengan pendidikan damai. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi metode, yang memastikan akurasi melalui perbandingan data dari wawancara, observasi, dan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekilas tentang Pendidikan Damai**

Pendidikan damai adalah upaya terorganisir untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman. Ide ini berkembang sejak abad ke-17 melalui pemikiran Jan Amos Comenius, yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial dan harmoni (Harris, 2011). Pada abad ke-20, Maria Montessori memperluas konsep ini dengan menekankan pengembangan sosial-emosional anak sebagai dasar untuk menciptakan generasi yang peduli dan berorientasi pada perdamaian global (Roque-Hernández, 2022).

Dalam konteks modern, pendidikan damai tidak hanya mengajarkan teori tentang perdamaian tetapi juga praktik yang mencakup lintas budaya, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Di Indonesia, pendidikan damai diwujudkan melalui penguatan pendidikan karakter, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2018, yang menekankan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman (Permendikbud, 2018). Kebijakan ini menjadi salah satu pedoman yang dapat berfungsi sebagai upaya untuk mendorong rekonsiliasi pasca-konflik dan membangun masyarakat yang inklusif. Di Aceh, misalnya, pemerintah daerah

bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal seperti hikayat dan musyawarah adat ke dalam kurikulum (Ilwan et al., 2023). Program ini bertujuan untuk tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam.

Pendidikan damai juga memiliki landasan teoritis yang kuat. Teori fungsionalisme Emile Durkheim menyoroti peran pendidikan dalam membangun solidaritas sosial dengan menanamkan norma dan nilai yang mendukung perdamaian (Durkheim, 1964; Pope, 1975). Sebaliknya, teori kritis Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan untuk menciptakan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural dan memberdayakan individu untuk melawan ketidakadilan (Freire, 1982). Dari sisi kebijakan, pendidikan damai di Indonesia menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diinisiasi UNESCO (Nizam Mohd Said & Mohd Hanafiah, 2021). Target ke-4 dari agenda ini adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua, yang mencakup pendidikan damai sebagai alat untuk mencegah konflik (UNESCO, 2016). Praktik serupa juga terlihat di Rwanda, di mana pendidikan damai menjadi instrumen utama untuk merekonstruksi masyarakat pasca-genosida. Praktik serupa terlihat di Rwanda, di mana pendidikan damai menjadi instrumen utama untuk merekonstruksi masyarakat pasca-genosida (Basabose, 2015; McNamee, 2021).

Meskipun konteks Aceh berbeda, khususnya dengan adanya nilai budaya lokal seperti hikayat dan musyawarah adat, pendekatan Rwanda memberikan pelajaran penting tentang pentingnya dialog lintas kelompok. Pengintegrasian elemen budaya lokal di Aceh pada dasarnya menunjukkan bagaimana pendidikan damai dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya spesifik. Melalui kurikulum berbasis toleransi dan dialog lintas kelompok, Rwanda telah berhasil mengintegrasikan pendidikan damai ke dalam semua tingkat pendidikan, menciptakan landasan kuat untuk rekonsiliasi sosial (Bekerman & Zembylas, 2016). Namun, untuk konteks Indonesia, tantangan tetap ada karena keberlanjutan kebijakan pendidikan damai membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, disparitas dalam implementasi pendidikan damai sering kali terjadi karena perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan finansial di tingkat daerah.

### **Nilai-nilai Pendidikan Damai yang Ditanamkan kepada Siswa**

MAN 1 Pidie, sebagai salah satu lembaga pendidikan unggulan di Kabupaten Pidie, telah menjadikan nilai-nilai pendidikan damai sebagai inti dari pendekatan pembelajaran dan kegiatan

sekolah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, nilai-nilai damai yang meliputi gotong royong, toleransi, kerja sama, penghormatan, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap hak orang lain, telah menjadi bagian yang terus diinternalisasikan kepada siswa. Nilai ini tidak hanya diajarkan melalui materi pelajaran tetapi juga diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari dan program ekstrakurikuler. Berikut penjelasannya:

### 1) Gotong Royong

Gotong royong diterapkan melalui aktivitas seperti kerja kelompok di kelas dan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh siswa. Nilai ini diajarkan untuk membangun solidaritas sosial di antara siswa. "Melalui kerja kelompok, siswa belajar untuk saling membantu dan menghargai kontribusi masing-masing," ujar Ibu Izzatul Ismi, guru sosiologi di MAN 1 Pidie (Wawancara, Juni 2024). Disamping itu, dukungan pemerintah terhadap implementasi nilai ini dapat dilihat dari program-program pendidikan karakter yang mempromosikan kerja sama sebagai salah satu pilar utama. Hal ini tercermin dari dukungan kementerian agama Kabupaten Pidie dalam berbagai kegiatan tahunan siswa seperti Gemansa dan kegiatan sejenis yang memungkinkan siswa untuk bergotong-royong dalam menyuksekannya

### 2) Toleransi.

Nilai toleransi diajarkan melalui diskusi kelas dan kegiatan lintas budaya yang mendorong siswa untuk memahami keberagaman sosial dan agama. Pak Mahdar, guru PPKN, menjelaskan bahwa siswa didorong untuk menghargai pendapat yang berbeda dan menerima keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan (Wawancara, Juni 2024). Pemerintah mendukung pendidikan toleransi ini melalui kebijakan pendidikan inklusif dan program ekstrakurikuler yang mempromosikan dialog lintas budaya. Hal ini juga tercermin dari beragam kegiatan extra siswa yang seperti kegaitan rohis maupun kegiatan peringatan hari-hari besar yang mengedepankan aspek toleransi.

### 3) Kerja Sama.

Kerja sama menjadi nilai penting dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diajarkan untuk berbagi peran dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Aktivitas pramuka juga menjadi media untuk melatih siswa berkolaborasi dalam konteks yang lebih luas. "Kegiatan ini membantu siswa memahami pentingnya keberhasilan kolektif," jelas Ibu Izzatul (Wawancara, Juni 2024). Implementasi nilai ini didukung oleh

kebijakan penguatan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun generasi yang toleran dan inklusif.

4) Penghormatan.

Nilai penghormatan diterapkan melalui interaksi siswa dengan teman dan guru. Bapak Syafaruddin Gultom, Wakil Kepala Kurikulum, menekankan bahwa penghormatan menjadi dasar bagi lingkungan belajar yang harmonis. "Ketika siswa menghormati satu sama lain, mereka menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran," ujarnya (Wawancara, Juni 2024). Dari pengamatan penulis, kebijakan pemerintah lokal seperti dukungan pada kegiatan yang melibatkan stakeholder mendorong pendidikan berbasis nilai seperti toleransi dan penghormatan memperkuat implementasi nilai ini di sekolah.

5) Kepemimpinan.

Nilai kepemimpinan diajarkan melalui program seperti OSIM, di mana siswa dilatih untuk memimpin dengan etika dan tanggung jawab. "Kepemimpinan yang diajarkan di sini menekankan empati dan kemampuan mendengarkan," jelas Ibu Izzatul (Wawancara, Juni 2024). Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa dalam mengelola dinamika kelompok di sekolah tetapi juga mempersiapkan mereka untuk memimpin dengan etika di masa depan. Berbagai program yang mencerminkan hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah lokal, khususnya Kemenag Kabupaten Pidie yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi siswa dan OSIM.

6) Penghargaan terhadap Hak Orang Lain.

Penghargaan terhadap hak orang lain diajarkan melalui diskusi kelas dan simulasi sosial yang menekankan pentingnya hak asasi manusia. Pak Mahdar menyebutkan bahwa siswa belajar untuk menghormati hak teman sekelas mereka, seperti hak untuk didengar dan dihormati (Wawancara, Juni 2024). Nilai ini relevan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan pendidikan inklusif yang diinisiasi oleh pemerintah.

Implementasi nilai-nilai pendidikan damai di MAN 1 Pidie tidak hanya merepresentasikan upaya lembaga pendidikan dalam membangun karakter siswa, tetapi juga mencerminkan sinergi dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai. Pemerintah lokal yang dalam konteks ini adalah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, melalui kebijakan penguatan pendidikan karakter dan program pendidikan inklusif, memberikan kerangka yang memungkinkan lembaga pendidikan seperti MAN 1 Pidie

untuk mengembangkan pendekatan yang terintegrasi antara pembelajaran formal dan aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kerja sama, penghormatan, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap hak orang lain tidak hanya diajarkan secara konseptual tetapi juga diterapkan dalam praktik yang relevan dengan kebutuhan sosial lokal.

Gotong royong dan kerja sama, misalnya, menjadi dasar yang penting dalam membangun solidaritas sosial. Kegiatan seperti proyek kelompok, pramuka, dan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan fungsi pendidikan sebagai alat sosialisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim (Ritzer, 2012), tetapi juga memiliki makna khusus dalam konteks Aceh. Sebagai daerah yang memiliki sejarah konflik, praktik gotong royong di madrasah tentunya dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan solidaritas di antara siswa dari berbagai latar belakang. Hal ini dipertegas oleh beberapa studi yang menyatakan bahwa aktivitas kolaboratif di pada dasarnya berperan penting dalam rekonsiliasi sosial dengan mendorong kontak antar kelompok, kepercayaan, pengampunan, dan penyembuhan kolektif (Hughes & Kostovicova, 2018; Schiller, 2012; Shapiro, 2020).

Sementara itu, nilai toleransi dan penghormatan menjadi elemen penting dalam membentuk siswa yang mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman. MAN 1 Pidie menerapkan nilai-nilai ini melalui diskusi kelas, perayaan lintas budaya, dan program pendidikan berbasis nilai. Praktik ini tidak hanya membantu siswa memahami keberagaman sebagai aset tetapi juga mengurangi prasangka yang dapat memicu konflik di kemudian hari. Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif, pemerintah mendukung pengajaran nilai-nilai ini dengan menyediakan panduan kurikulum dan pelatihan guru untuk memastikan pembelajaran yang efektif (Ndwandwe, 2024). Di Aceh, penerapan nilai toleransi di sekolah berkontribusi pada upaya rekonsiliasi sosial dengan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan siswa untuk memahami dan menghormati perbedaan (Mualim, 2024).

Kepemimpinan dan penghargaan terhadap hak orang lain menjadi bagian integral dari pendidikan damai di MAN 1 Pidie. Melalui program seperti OSIM, siswa diajarkan untuk mengambil peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan komunitasnya. Pendekatan ini mencerminkan teori Freire (Bolin, 2017), yang menekankan pentingnya kepemimpinan etis dalam membawa perubahan sosial. Di sisi lain, penghargaan terhadap hak orang lain membantu siswa memahami pentingnya keadilan sosial dalam

menciptakan masyarakat yang harmonis. Diskusi tentang hak asasi manusia dan simulasi sosial di kelas memberikan konteks nyata bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Penerapan nilai-nilai pendidikan damai di MAN 1 Pidie mencerminkan upaya holistik dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga mendukung tujuan pendidikan global, seperti yang diidentifikasi oleh UNESCO (2016). Pendidikan damai di lembaga pendidikan ini tentunya membantu menciptakan generasi yang mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Dalam konteks Aceh, peran ini menjadi sangat signifikan, mengingat kebutuhan untuk membangun kembali struktur sosial yang sempat terfragmentasi akibat konflik. Lebih jauh, keberhasilan implementasi nilai-nilai ini tidak lepas dari peran pemerintah yang memberikan dukungan melalui regulasi dan penyediaan sumber daya. Kebijakan pendidikan karakter, pelatihan guru, dan program ekstrakurikuler berbasis nilai menjadi landasan penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendekatan berbasis pendidikan damai.

### **Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Damai dalam Proses Pembelajaran**

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai pendidikan damai di MAN 1 Pidie dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, mengintegrasikan pembelajaran formal dengan praktik nyata di luar kelas. Proses ini mencakup tiga aspek utama: pengajaran berbasis kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan penguatan budaya sekolah. Ketiga aspek ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi siswa tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai damai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka.

#### **1) Pengajaran Berbasis Kurikulum.**

Nilai-nilai pendidikan damai di MAN 1 Pidie diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti PPKN, Sosiologi, Sejarah, dan Pendidikan Agama Islam. Guru menggunakan pendekatan berbasis diskusi untuk membahas isu-isu sosial, keberagaman, dan hak asasi manusia. Dalam wawancara, Ibu Izzatul Ismi, guru Sosiologi, menjelaskan bahwa diskusi kelompok digunakan sebagai metode utama untuk membantu siswa memahami konsep-konsep seperti kerja sama, toleransi, dan penghormatan. "Diskusi memungkinkan siswa untuk belajar dari sudut pandang satu sama lain, memperkuat kemampuan mereka untuk mendengarkan dan menghargai perbedaan," ungkapnya (Wawancara, Juni 2024). Pengajaran berbasis kurikulum ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan pendidikan karakter. Melalui pengintegrasian nilai-nilai damai dalam kurikulum formal, MAN 1 Pidie

memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep-konsep tersebut secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung oleh panduan dari UNESCO (2016), yang menekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai perdamaian ke dalam pendidikan formal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

## 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Pidie, seperti pramuka, OSIM, dan Palang Merah Remaja (PMR), memberikan ruang bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan damai dalam konteks yang lebih praktis. Dalam kegiatan pramuka, misalnya, siswa dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok, memimpin dengan etika, dan menyelesaikan konflik secara damai. Kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Pidie, seperti pramuka, OSIM, dan Palang Merah Remaja (PMR), merupakan implementasi langsung dari kebijakan pendidikan karakter yang digagas melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2018. Sebagai contoh, dalam kegiatan pramuka, siswa dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok, memimpin dengan etika, dan menyelesaikan konflik secara damai, yang sejalan dengan panduan pemerintah tentang pengembangan nilai gotong royong dan kepemimpinan. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan melalui pelatihan khusus untuk pembina pramuka, yang bertujuan untuk memastikan nilai-nilai perdamaian dapat diterapkan dalam aktivitas ekstrakurikuler. Ibu Ayu, guru SKI, menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, siswa belajar pentingnya tanggung jawab kolektif dan kepemimpinan yang berbasis empati. "Kegiatan ekstrakurikuler memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari di kelas ke dalam situasi nyata," jelasnya (Wawancara, Juni 2024).

## 3) Penguatan Budaya dilingkungan madrasah.

Selain pengajaran formal dan kegiatan ekstrakurikuler, nilai-nilai pendidikan damai juga ditanamkan melalui budaya sekolah yang mendukung. Guru dan staf di MAN 1 Pidie berperan sebagai teladan dalam menunjukkan nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan, dan gotong royong dalam interaksi sehari-hari. Bapak Syafaruddin Gultom, Wakil Kepala Kurikulum, menekankan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. "Guru memberikan contoh nyata kepada siswa, seperti cara berkomunikasi yang sopan dan menyelesaikan konflik dengan damai," ujarnya (Wawancara, Juni 2024). Budaya dilingkungan madrasah yang inklusif ini didukung oleh kebijakan pendidikan pemerintah yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang

kondusif dan aman bagi semua siswa. Dalam konteks Aceh, penerapan budaya sekolah ini juga berfungsi untuk memperkuat rekonsiliasi sosial, menciptakan lingkungan di mana siswa dari latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai.

Implementasi nilai-nilai pendidikan damai di MAN 1 Pidie menunjukkan pendekatan yang holistik, menggabungkan pembelajaran formal, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah untuk menciptakan pengalaman belajar yang transformatif. Melalui integrasi nilai-nilai damai dalam kurikulum formal, siswa tidak hanya diajarkan konsep-konsep seperti toleransi dan kerja sama tetapi juga diberikan alat untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini mendukung pandangan UNESCO (2016) tentang pentingnya pendidikan berbasis nilai untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Kegiatan ekstrakurikuler memperkuat pembelajaran formal dengan memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata. Dalam kegiatan seperti pramuka dan OSIM, siswa belajar untuk bekerja sama, memimpin dengan etika, dan menghormati perbedaan. Pendekatan ini tidak hanya membentuk karakter siswa tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap proses rekonsiliasi sosial di Aceh. Beberapa kajian juga menegaskan bahwa pengalaman praktis dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mempercepat proses pembentukan karakter siswa yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan perdamaian di lembaga pendidikan dan masyarakat (Buckley & Lee, 2021; Javed & Srivastava, 2024; Nassar et al., 2024).

Budaya dilingkungan madrasah yang inklusif memberikan dasar yang kuat untuk keberlanjutan nilai-nilai pendidikan damai. Dalam kerangka teori Durkheim, budaya sekolah berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi yang menanamkan norma sosial kepada siswa, membantu membangun kohesi di antara individu dengan latar belakang yang berbeda (Ritzer, 2008). Di MAN 1 Pidie, norma ini diwujudkan melalui interaksi sehari-hari yang menekankan toleransi dan gotong royong. Selain itu, teori Paulo Freire (1982; Kester, 2010) memberikan perspektif kritis dengan menekankan bahwa pendidikan damai tidak hanya mentransmisikan nilai tetapi juga menciptakan ruang bagi siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam pelatihan kepemimpinan OSIM, di mana siswa dilatih untuk memimpin dengan tanggung jawab dan kepekaan sosial, mencerminkan prinsip pembebasan Freire. Dalam konteks Aceh budaya seperti ini menjadi elemen penting dalam mendukung rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini juga mencerminkan dukungan pemerintah melalui kebijakan pendidikan inklusif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung untuk semua siswa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa MAN 1 Pidie telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan damai ke dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk kurikulum formal, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kerja sama, penghormatan, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap hak orang lain diajarkan secara sistematis dan diterapkan dalam interaksi sehari-hari siswa. Implementasi nilai-nilai ini menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun karakter siswa yang toleran, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah melalui penguatan pendidikan karakter, pelatihan guru, dan penyediaan sumber daya berperan penting dalam keberhasilan program ini. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator utama dalam menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan pendidikan damai menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan formal, khususnya di daerah pasca-konflik seperti Aceh.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan damai membutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, program pendidikan damai di MAN 1 Pidie tidak hanya memberikan dampak pada pembentukan karakter siswa tetapi juga berkontribusi pada rekonsiliasi sosial dan penguatan kohesi masyarakat. Namun, beberapa tantangan tetap ada, seperti disparitas sumber daya di tingkat daerah dan perlunya pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan. Untuk itu, evaluasi dan peningkatan kebijakan pendidikan damai secara berkala diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apebende, E., Ifere, A., & Osam, O. (2010). Integrating peace education curriculum into the formal primary school curricular. *Sophia: An African Journal of Philosophy*, 12(2), 64–70. <https://www.ajol.info/index.php/sophia/article/view/81151>
- B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis Data: A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Basabose, J. de D. (2015). *Educating young people for peace in Rwanda*. Peace Insight. <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peace-education-rwanda/?location=rwanda&theme=peace-education>
- Bekerman, Z., & Zembylas, M. (2016). Identity negotiations in conflict-ridden societies: historical and anthropological perspectives. *Paedagogica Historica*, 52(1–2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/00309230.2015.1133674>

- Bolin, T. D. (2017). Struggling for democracy: Paulo Freire and transforming society through education. *Policy Futures in Education*, 15(6), 744–766. <https://doi.org/10.1177/1478210317721311>
- Buckley, P., & Lee, P. (2021). The impact of extra-curricular activity on the student experience. *Active Learning in Higher Education*, 22(1), 37–48. <https://doi.org/10.1177/1469787418808988>
- Danarwati, Y. S. (2013). Manajemen Pembelajaran Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, 6(13), 1–18.
- Durkheim, E. (1964). *The Division Of Labor in Society*. Free Press.
- Fournier-Sylvester, N. (2020). Finding Ways to Connect: Potential Role of Social Media in Peace Education. *Palgrave Studies in Educational Media*, 41–59. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-50949-1\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-50949-1_3)
- Freire, P. (1982). *Pedagogy of the Oppressed*. Penguin.
- Harris, I. M. (2011). History of peace education. In *Handbook on Peace Education* (pp. 11–20). <https://doi.org/10.4324/9780203837993.ch2>
- Hughes, J., & Kostovicova, D. (2018). Introduction: rethinking reconciliation and transitional justice after conflict. *Ethnic and Racial Studies*, 41(4), 617–623. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1406129>
- Ilham, D., S, M. R., Karunia, L., Saleh, S., & Brata, J. T. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 155–162. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3736>
- Ilwan, I., Asari, H., & Wijaya, C. (2023). Policy Implementation of Acehese Culture Local Content Curriculum Based on Islamic Sharia In Tsanawiyah State Madrasah Bireuen District. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/EI.V12I01.4401>
- Javed, I., & Srivastava, A. K. (2024). An Analysis of Role of Extracurricular Activities (ECA) in Higher Education. *Revista Review Index Journal of Multidisciplinary*, 4(1), 66–73. <https://doi.org/10.31305/rrijm2024.v04.n01.008>
- Kester, K. (2010). Education for Peace: Content, Form, and Structure: Mobilizing Youth for Civic Engagement. *Peace and Conflict Review*, 4(2), 1–10.
- Manan, A., Hadi, A., & Rahmat Saputra, I. (2022). Post-conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(2), 162. <https://doi.org/10.22146/jsp.66177>
- Manar, D. G. (2019). Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39272>
- McNamee, T. (2021). Such a Long Journey: Peacebuilding After Genocide in Rwanda. In T. McNamee & M. Muyangwa (Eds.), *The State of Peacebuilding in Africa* (pp. 379–395). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-46636-7\\_21](https://doi.org/10.1007/978-3-030-46636-7_21)
- Mualim, I. (2024). *Membangun Sekolah Damai: Upaya BNPT RI Mengatasi Intoleransi dan Perundungan di Aceh*. Garda Nasional. <https://gardanasional.co.id/membangun-sekolah-damai-upaya-bnpt-ri-mengatasi-intoleransi-dan-perundungan-di-aceh/>
- Nassar, F. S., Abbas, A. O., Al-Saify, H., & Ali, O. M. (2024). The Impact of Extracurricular

- Activities on Developing Academic Standing, Student Satisfaction, Performance, and Bolstering the Academic Reputation of Higher Education Institutions from the Perspective of SDGs. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e02758. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe02758>
- Ndwanwe, N. D. (2024). Towards a model for incorporating peace education in South African higher education. *South African Journal of Higher Education*, 38(2), 236–253. <https://doi.org/10.20853/38-2-5722>
- Nizam Mohd Said, M., & Mohd Hanafiah, M. (2021). *Sub-regional Policy Report on ESD for 2030 in Southeast Asia*. UNESCO Jakarta Office. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381503>
- Permendikbud. (2018). *Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal*. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. <https://peraturan.go.id/id/permendikbud-no-20-tahun-2018>
- Pope, W. (1975). Durkheim as a Functionalist. *The Sociological Quarterly*, 16(3), 361–379. <http://www.jstor.org/stable/4105747>
- Qulsum, D. U., & Hermanto, H. (2022). Peran Guru Penggerak Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Ketahanan Pendidikan Karakter Abad 21. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.71741>
- Ritzer, G. (2008). *Sociological Theory*. MC Graw Hill.
- Ritzer, G. (2012). *Teori sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern* (8th ed.). Pustaka Pelajar.
- Roque-Hernández, R. V. (2022). Building a Culture of Peace in Everyday Life With Inter- and Transdisciplinary Perspectives. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.847968>
- Schiller, R. (2012). *Talking to the other: The effects of intergroup contact on reconciliation in post-conflict societies*. Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University).
- Shapiro, D. L. (2020). Reconciliation Systems Design: A Systematic Approach to Collective Healing in Post-Conflict Societies. *Harvard Negotiation Law Review*, 26(193), 194–264. [https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A14%3A22026014/detailv2?sid=ebsco%3Aplik%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A152526727&crl=c&link\\_origin=www.google.com](https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A14%3A22026014/detailv2?sid=ebsco%3Aplik%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A152526727&crl=c&link_origin=www.google.com)
- Syahputra, M. A. D. (2020). Peranan Pendidikan IPS dalam Pencegahan Konflik Melalui Pendidikan Perdamaian. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.23887/pips.v4i1.3036>
- UNESCO. (2016). *Education 2030 - Incheon Declaration and Framework for Action for implementation of Sustainable Development Goal 4: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243278>
- Yusuf, M. J. (2017). Urgensi Pendidikan Nilai untuk Aceh Damai Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 50. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.64>